PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PELAJU DAN DESA TEPIAN DI KECAMATAN SEMBAKUNG, DESA TABUR LESTARI, DESA SRINANTI DAN KELURAHAN NUNUKAN TENGAH DI KECAMATAN NUNUKAN DALAM WILAYAH

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan kelurahan serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa dan Kelurahan baru dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelaju, Desa Tepian, Desa Tabur Lestari, Desa Srinanti dan Kelurahan Nunukan Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 25 Seri E Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 50 Seri D Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PELAJU DAN DESA TEPIAN DI KECAMATAN SEMBAKUNG, DESA TABUR LESTARI, DESA SRINANTI DAN KELURAHAN NUNUKAN TENGAH DI KECAMATAN NUNUKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun.
11. Sekretaris Desa adalah unsur pelayanan yang memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Unsur pelaksana teknis lapangan adalah pelaksana teknis di lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-desa yang telah ada.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
16. Pemerintah Kelurahan adalah lurah dan perangkat kelurahan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Pelaju dan Desa Tepian di Kecamatan Sembakung, Desa Tabur Lestari, Desa Srinanti dan Kelurahan Nunukan Tengah di Kecamatan Nunukan.

Pasal 4

Desa Pelaju dibentuk yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 01 Pelaju Sungai Mayo;
- b. RT 02 Sungai Igadung;
- c. RT 03 Sungai Itolop;
- d. RT 04 Sungai Ikunju;
- e. RT 05 Sungai Kalasas; dan
- f. RT 06 Sungai Tagang.

Pasal 5

Desa Tepian dibentuk yang berasal dari sebagian Wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung yang terdiri atas wilayah:

- a. RT 01 Tepian Hulu;
- b. RT 02 Tepian Hilir; dan
- c. RT 03 Labion.

Pasal 6

Desa Tabur Lestari merupakan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Seimenggaris SP.1 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah:

- a. RT 01 Blok A UPT Seimenggaris SP.1;
- b. RT 02 Blok B1 UPT Seimenggaris SP.1;
- c. RT 03 Blok B2 UPT Seimenggaris SP.1;
- d. RT 04 Blok C1 UPT Seimenggaris SP.1;
- e. RT 05 Blok C2 UPT Seimenggaris SP.1;
- f. RT 06 Blok D1 UPT Seimenggaris SP.1;
- g. RT 07 Blok D2 UPT Seimenggaris SP.1;
- h. RT 08 Blok E UPT Seimenggaris SP.1;
- i. RT 09 Kamp PKS PT. Nunukan Jaya Lestari (NJL);
- j. RT 10 Kamp Sawmill PT. NJL;
- k. RT 11 Kamp Pangkalan 1 PT> NJL;
- l. RT 12 Kamp Nursery PT. NJL;
- m. RT 13 Kamp Peringkat 2 PT. NJL; dan
- n. RT 14 Kamp Peringkat 3 PT. NJL.